



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH BANTEN**



LKIP 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



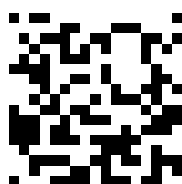
KATA PENGANTAR



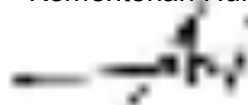
Semangat reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tentunya tidak begitu sederhana, dibutuhkan manajemen penyelenggaraan, pengendalian dan perbaikan secara terus-menerus guna mempercepat keberhasilan capaian kinerja yang kemudian harus dipertanggungjawabkan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada pengukuran hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran periode Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja. Hasil terhadap capaian kinerja diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dimasa mendatang.



Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten



Agus Toyib
NIP. 196306171985031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
Permasalahan	8
Sistematika Pelaporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
Visi, Misi, dan Tujuan	11
Tata Nilai dan Sasaran Strategis	14
Perjanjian Kinerja	14
Program dan Anggaran	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
Capaian Kinerja	19
Kanwil Kemenkumham Banten	19
Divisi Administrasi	28
Divisi Yankum - Administrasi Hukum Umum	32
Divisi Yankum Hak Asasi Manusia	36
Divisi Yankum - Kekayaan Intelektual	39
Divisi Yankum Peraturan Perundang-undangan	43
Divisi Yankum - Badan Pembinaan Hukum Nasional	45
Divisi Yankum - Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	51
Divisi Keimigrasian	53
Divisi Pemasarakatan	56
BAB IV PENUTUP	62
Kesimpulan	63
Rencana Tindak Lanjut	64

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai instansi vertikal Kantor Wilayah Banten mengemban tugas dibidang hukum dan HAM dengan membangun hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian, untuk mendukung terwujudnya visi, dan pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

VISI

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Setiap Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tiga Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Misi Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 8 yang kemudian diterjemahkan kedalam 7 Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

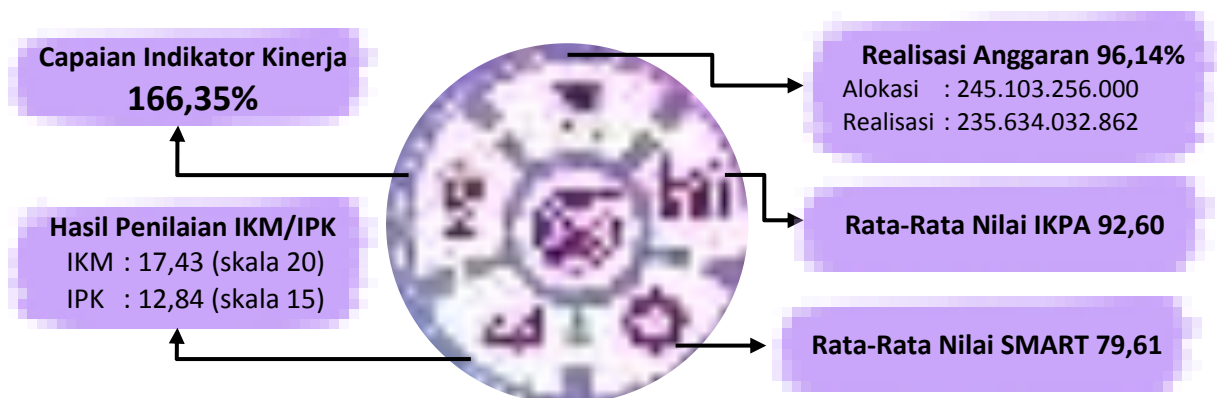
1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Banten menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengekoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
4. Pengekoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pamasarakatan.
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Selama periode tahun 2020, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah Banten. Dari total 29 target indikator kinerja Kantor Wilayah Banten, hasil penilaian capaian seluruh indikator kinerja Kantor Wilayah Banten pada periode tahun 2020 yaitu sebesar **166,35%** dengan realisasi anggaran sebesar 96,14%.

CAPAIAN KINERJA KANWIL BANTEN 2020



Keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pada tahun 2020 ini juga dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Kantor Wilayah dan UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Banten selama tahun 2020 diantaranya :

- Penghargaan sebagai “Terbaik Pertama” Pelaksana Reformasi Birokrasi Tingkat Kantor Wilayah Tahun 2020 yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
- Penghargaan dari Kemenpan-RB kepada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020.
- Penghargaan dari Kemenpan-RB kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020.

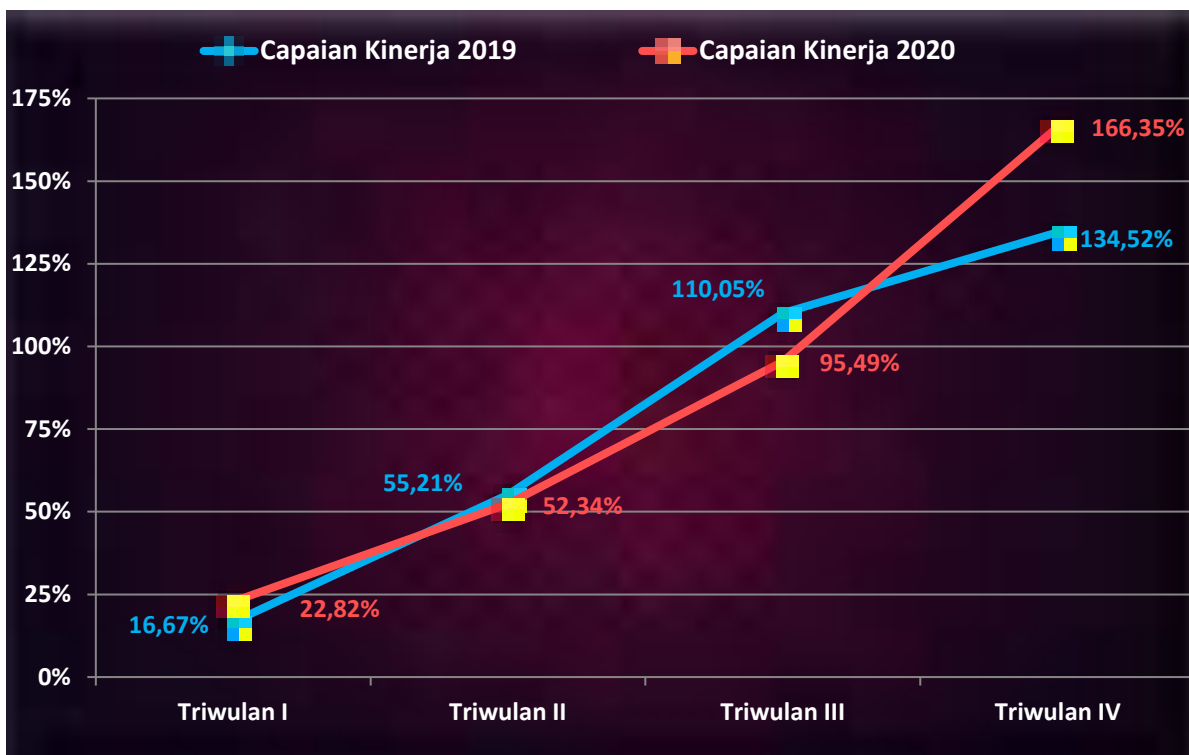


- Meraih Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2020 dari Menteri Hukum dan HAM kepada LP Kelas III Rangkasbitung.
- Meraih Penghargaan atas upaya dalam mendorong sebagian besar atau seluruh Kabupaten/Kota di Wilayahnya menjadi Kabupaten/Kota Peduli HAM. Terdapat 8 Kabupaten/Kota atau seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Banten yang mendapat penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM

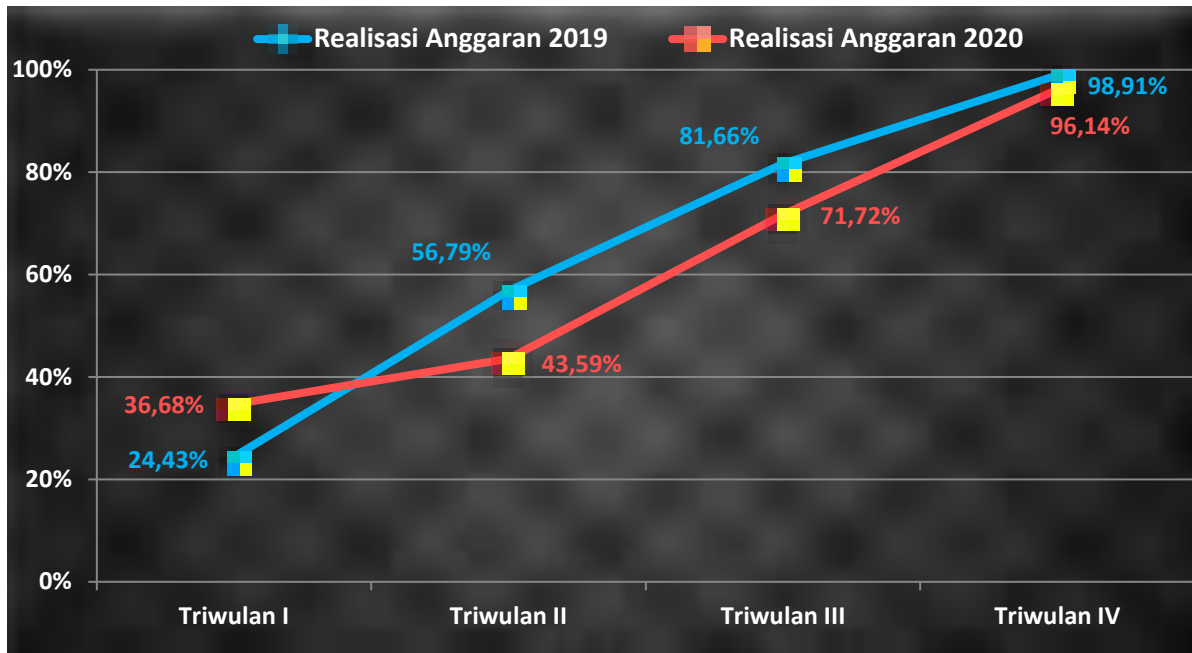


CAPAIAN KINERJA YEAR ON YEAR KANWIL BANTEN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (YoY)



CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (YoY)

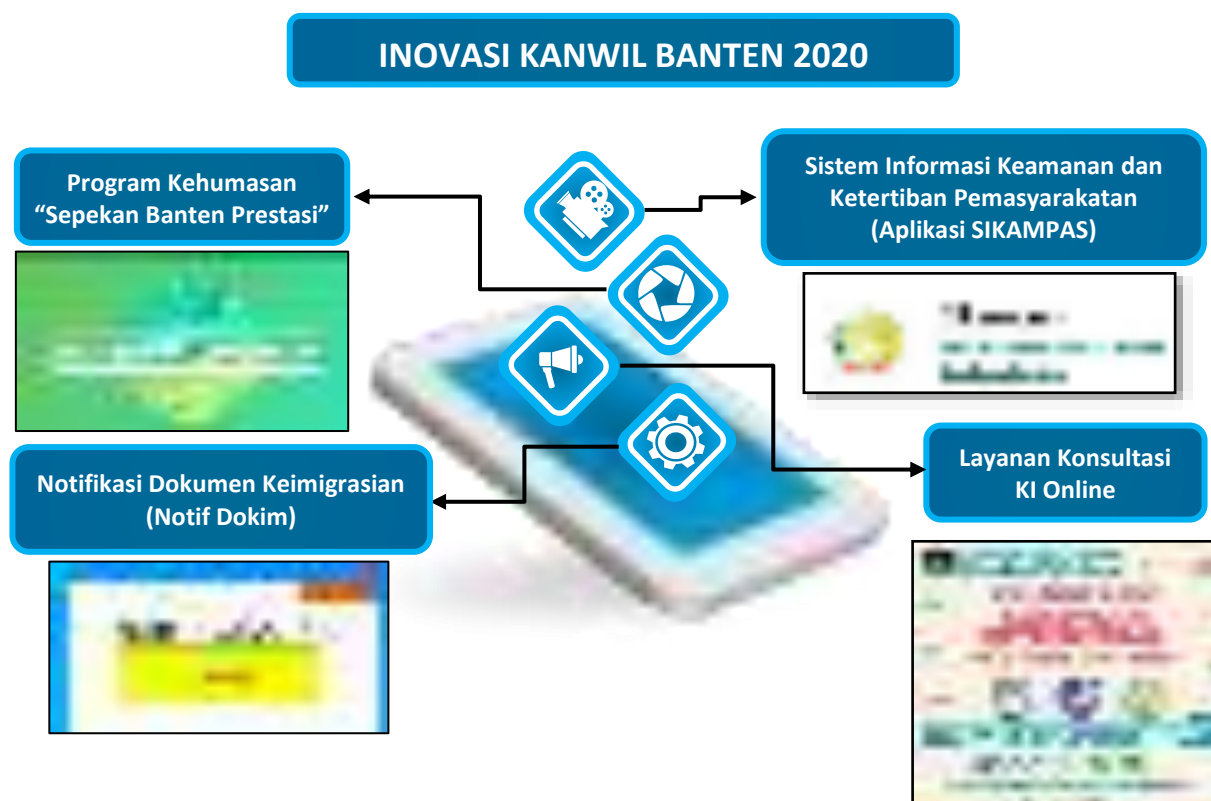


Capaian kinerja Kanwil Banten pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, terlihat dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2020 yang meningkat sebesar 45,05% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan dalam sisi kinerja anggaran, pada tahun 2020 realisasi anggaran Kanwil Banten terkoreksi sebesar -2,77% dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan berbagai faktor dan salah satunya sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang terjadi secara global dan merupakan Risiko Luar Biasa yang terjadi diluar kemampuan unit kerja dan berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian kinerja organisasi serta perlu segera ditangani. Akibat pandemi Covid-19 tersebut, terdapat beberapa kegiatan Kanwil Banten pada tahun 2020 ini yang harus tertunda dan menyesuaikan pelaksanaannya untuk menurunkan risiko penyebaran Covid-19 sehingga kinerja realisasi anggaran berjalan kurang baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kinerja pelaksanaan anggaran, maka Kanwil Banten melakukan *refocusing* anggaran melalui efisiensi dan penghematan anggaran sehingga dapat dialokasikan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Lingkungan Kanwil Banten.

Jika melihat besarnya dampak risiko yang ditimbulkan atas adanya pandemi Covid-19, capaian kinerja Kanwil Banten Tahun 2020 telah tercapai sangat optimal dengan hasil capaian melebihi target yang telah ditetapkan bahkan meningkat dibanding capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan hasil penanganan risiko yang cepat dan tepat sasaran melalui pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di lingkungan Kantor Wilayah Banten.

Dalam rangka implementasi e-gov, Kantor Wilayah Banten telah mewujudkan inovasi-inovasi yang berfokus pada percepatan dan kualitas pelayanan publik agar dapat dijangkau dan memudahkan masyarakat dalam proses layanan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten. Inovasi-inovasi yang dihasilkan tersebut merupakan prestasi bagi Kanwil Kemenkumham Banten dalam mendukung sasaran strategis terkait Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut Inovasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten selama Tahun 2020, antara lain :



Hasil pencapaian kinerja dan Inovasi Kantor Wilayah Banten tersebut harus mampu dipertahankan dan dilakukan evaluasi kinerja secara berkesinambungan melalui berbagai perbaikan, kreasi dan inovasi serta monitoring berkala atas pencapaian kinerja sehingga kedepan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dapat menghasilkan prestasi yang bermanfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM RI serta masyarakat luas.

BAB I

PENDAHULUAN

Informasi tentang kondisi gambaran umum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, yang berisikan latar belakang, profil, struktur organisasi dan tugas kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Banten.

LATAR BELAKANG

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM menjalankan tugas dan fungsi di bidang HAM, bidang peraturan perundang-undangan, bidang masyarakat, dan bidang keimigrasian. Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Banten berusaha mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM antara lain :

1. Meningkatkan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Banten.
2. Pelayanan administrasi jasa hukum di Wilayah Banten.
3. Pemajuan HAM di Wilayah Banten.
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas baik di Wilayah Banten.
5. Fasilitasi Pembentukan produk hukum daerah.
6. Pembinaan dan pembangunan hukum serta peningkatan bantuan hukum dan kesadaran hukum di Wilayah Banten.
7. Melaksanakan kajian hukum di Wilayah.
8. Meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah.
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Divisi, yaitu :

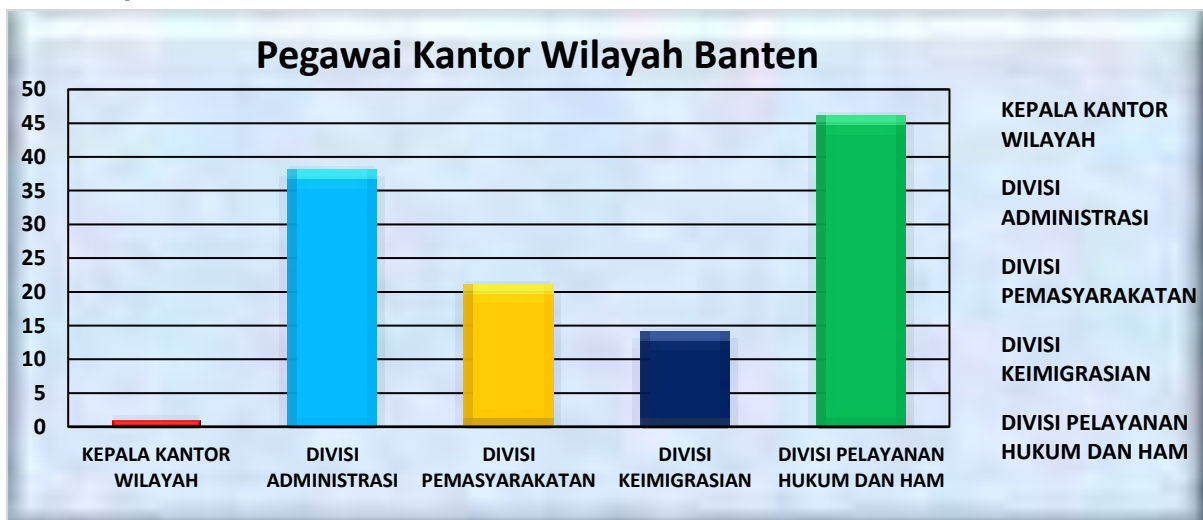
1. Kepala Divisi Administrasi
2. Kepala Divisi Masyarakat
3. Kepala Divisi Keimigrasian
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terdiri dari 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis antara lain :

1. Lembaga Masyarakat Kls I Tangerang

2. Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Pemuda
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kls I Tangerang
4. Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Perempuan
5. Lembaga Pemasyarakatan Kls IIB Anak Wanita
6. Lembaga Pemasyarakatan Kls III Cilegon
7. Lembaga Pemasyarakatan Kls II Serang
8. Rumah Tahanan Negara Kls I Tangerang
9. Rumah Tahanan Negara Kls IIB Serang
10. Rumah Tahanan Negara Kls IIB Rangkasbitung
11. Rumah Tahanan Negara Kls IIB Pandeglang
12. Balai Pemasyarakatan Kls II Serang
13. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kls I Serang
14. Kantor Imigrasi Kls I Tangerang
15. Kantor Imigrasi Kls II TPI Cilegon
16. Kantor Imigrasi Kls I Serang
17. Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
18. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Ciangir
19. Balai Pemasyarakatan Ciangir

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Banten menjalankan tugas dan fungsi dibidang administrasi hukum umum, bidang HAM, bidang kekayaan intelektual, bidang peraturan perundang-undangan, bidang pembinaan hukum nasional, bidang penelitian dan pengembangan hukum dan HAM, bidang pemasyarakatan dan bidang keimigrasian. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Wilayah Banten di dukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah 120 pegawai yang tersebar pada 4 Divisi, seperti yang digambarkan pada diagram berikut :



TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat.
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terdiri atas :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan

pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;

- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi

Keimigrasian; dan

- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN



PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama tahun 2020, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan organisasi antara lain :

- Potensi gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Pelayanan dan pembinaan AHU di Wilayah tidak berjalan optimal.
- Ketidaktahuan masyarakat/publik untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual.
- Kurang harmonisnya perancangan Peraturan Daerah dengan Pemda Prov/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD di wilayah Banten.
- Potensi pemalsuan data yang diajukan OBH dalam pelaksanaan dan pencairan dana bantuan hukum
- Sistem JDIHN pada Instansi Pemerintah Daerah belum sesuai standar.
- Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian/pengkajian oleh satuan kerja.
- Rendahnya permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kanwil Banten.
- Belum optimalnya pelaksanaan tindak administrasi keimigrasian.
- Kurangnya optimalisasi pelaksanaan supervisi kepada Satuan Kerja.
- Kurangnya SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah.

Disamping kendala terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, pada periode tahun anggaran 2020 ini terdapat kendala dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi secara global yang merupakan Risiko Luar Biasa yang terjadi diluar kemampuan unit kerja dan berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian kinerja organisasi serta perlu segera ditangani. Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar dalam menghambat tujuan organisasi, maka pada tahun anggaran 2020 penanganan atas risiko tersebut menjadi prioritas utama pada Kanwil Banten melalui langkah2 strategis dan tepat sasaran dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di lingkungan Kanwil Banten.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Periode Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Banten Periode Tahun 2020.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Periode Tahun 2020.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Visi dan Misi, Rencana Strategis, Indikator Kinerja, dan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Periode Tahun 2020 serta strategi rencana tindak pada tahun 2021.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Informasi tentang perencanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan Rencana Penyerapan Anggaran T.A 2020, meliputi : Visi dan Misi, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Anggaran.

VISI, MISI & TUJUAN

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa *“Fokus Pemerintah adalah Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju”*. Peningkatan produktivitas SDM yang berorientasi pada hasil menjadi prioritas Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.



VISI

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Setiap Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Kantor Wilayah Banten mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM R.I. Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tiga Misi Presiden dan Wakil Presiden diantaranya Misi Nomor 6 yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Misi Nomor 7 yaitu Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara. Terakhir Misi Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga Misi Presiden tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 7 Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Berdasarkan Visi, Misi, serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Misinya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

<u>MISI</u>	<u>TUJUAN</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas; 3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang berkelanjutan; 5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; 7. Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kbutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima; 3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia; 4. Terlindunginya Hak Asasi Manusia; 5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan; 6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNI/WNA yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan; 7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

TATA NILAI & SASARAN STRATEGIS

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tata nilai ini mendukung saat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kami “**PASTI**” yang merupakan akronim dari **P**rofesional, **A**kuntabel, **S**inergi, **T**ransparan, dan **I**novatif. Tata nilai Kami “**Pasti**” merupakan landasan bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan berkarakter Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.

Berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berupaya mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM antara lain :

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Banten.
2. Pelayanan administrasi jasa hukum di Wilayah Banten.
3. Pemajuan HAM di Wilayah Banten.
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas baik di Wilayah Banten.
5. Fasilitasi Pembentukan produk hukum daerah.
6. Pembinaan dan pembangunan hukum serta peningkatan bantuan hukum dan kesadaran hukum di Wilayah Banten.
7. Melaksanakan kajian hukum di Wilayah.
8. Meningkatnya pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah.
9. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemasyarakatan.

PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi indikator kinerja yang menjadi alat bantu ukur mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	2	3	4
A Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten				
1	Divisi Administrasi	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	7,1
			Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	85
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	85
2	Divisi Yankum - Administrasi Hukum Umum	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU	3,0
			Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%
3	Divisi Yankum - Hak Asasi Manusia	Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	5 Instansi Pemerintah
			Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota
			Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM di Kantor Wilayah	1 Instansi Pemerintah
		Jumlah Layanan HAM Di Wilayah	3 Rekomendasi	
4	Divisi Yankum - Kekayaan Intelektual	Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Banten yang berkualitas baik sekali	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	120 Permohonan
			Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder
			Jumlah Pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
5	Divisi Yankum - Peraturan Perundang-	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	30 Raperda

	undangan	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah	12 orang
6	Divisi Yankum - Badan Pembinaan Hukum Nasional	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	376 Orang
			Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/kelompok masyarakat miskin	23 Kegiatan
			Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Daerah
			Jumlah penyuluhan Hukum di daerah	1 Daerah
			Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Daerah
			Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDHN	1 Daerah
7	Divisi Yankum - Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis Riset	Persentase rekomendasi hasil kajian diwilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%
			Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
8	Divisi Keimigrasian	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	7,3
		Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%
9	Divisi Pemasyarakatan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan Di Wilayah	90%
		Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di wilayah	Prosentase UPT Pemasyarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	90%
		Terwujudnya Produktivitas Narapidana	Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	100%

	Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna		
	Terwujudnya Mantan Narapidana/ Anak yang Taat Hukum Tahanan;	Menurunnya Persentase Residivis Di Wilayah	1%
	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah	90%

PROGRAM DAN ANGGARAN

Disamping pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap optimalisasi penyerapan anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
	1	2
A	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	245.103.256.000
1	Divisi Administrasi	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	17.400.401.000
2	Divisi Yankum - Administrasi Hukum Umum	
	Administrasi Hukum Umum	2.568.000.000
3	Divisi Yankum Hak Asasi Manusia	
	Pemajuan HAM	228.984.000
4	Divisi Yankum - Kekayaan Intelektual	
	Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	780.915.000
5	Divisi Yankum - Peraturan Perundang-undangan	
	Pembentukan Hukum	167.378.000
6	Divisi Yankum - Badan Pembinaan Hukum Nasional	
	Pembinaan Hukum Nasional	1.972.278.000
7	Divisi Yankum - Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	
	Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	61.790.000
8	Divisi Keimigrasian	
	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	29.949.330.000
9	Divisi Pemasyarakatan	
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	191.974.080.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Informasi tentang perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dan penyerapan anggaran dalam mendukung tercapainya sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

CAPAIAN KINERJA

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran *performance* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Hasil pengukuran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten periode Tahun 2020, diperoleh data capaian kinerja sebagai berikut :

KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Divisi Administrasi				
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	7,1	9,243	130,18%
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	85	96,72	113,79%

	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	85	86,375	105,70%
Divisi Yankum - Administrasi Hukum Umum				
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU	3,0	3,0	100%
	Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%	84,56%	105,70%
Divisi Yankum - Hak Asasi Manusia				
Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	5 Instansi Pemerintah	9 Instansi Pemerintah	180%
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	8 Kab/Kota	800%
Jumlah Layanan HAM Di Wilayah	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM di Kantor Wilayah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100%
	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	3 Rekomendasi	7 Rekomendasi	233,33%
Divisi Yankum - Kekayaan Intelektual				
Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Banten yang berkualitas baik sekali	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	120 Permohonan	745 Permohonan	620,83%
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder	60 Stakeholder	200%
	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	3 Lokus	150%
Divisi Yankum - Peraturan Perundang-undangan				
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	30 Raperda	86 Raperda	286,67%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan	12 orang	12 orang	100%

	peraturan daerah			
Divisi Yankum - Badan Pembinaan Hukum Nasional				
Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	376 Orang	461 Orang	122,61%
	Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/kelompok masyarakat miskin	23 Kegiatan	24 kegiatan	104,35%
	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%
	Jumlah penyuluhan Hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDHN	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%
Divisi Yankum - Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM				
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis Riset	Persentase rekomendasi hasil kajian diwilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	60%	100%
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 buku	100%
Divisi Keimigrasian				
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	7,3	8,715	119,38%
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	2%	100%
Divisi Pemasyarakatan				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan Di Wilayah	90%	87,15%	96,83%
Terlaksananya supervisi	Prosentase UPT	90%	100%	111,11%

Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan di wilayah	Pemasarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar			
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	100%	123,40%	123,40%
Terwujudnya Mantan Narapidana/ Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis Di Wilayah	1%	1%	100%
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah	90%	100%	111,11%

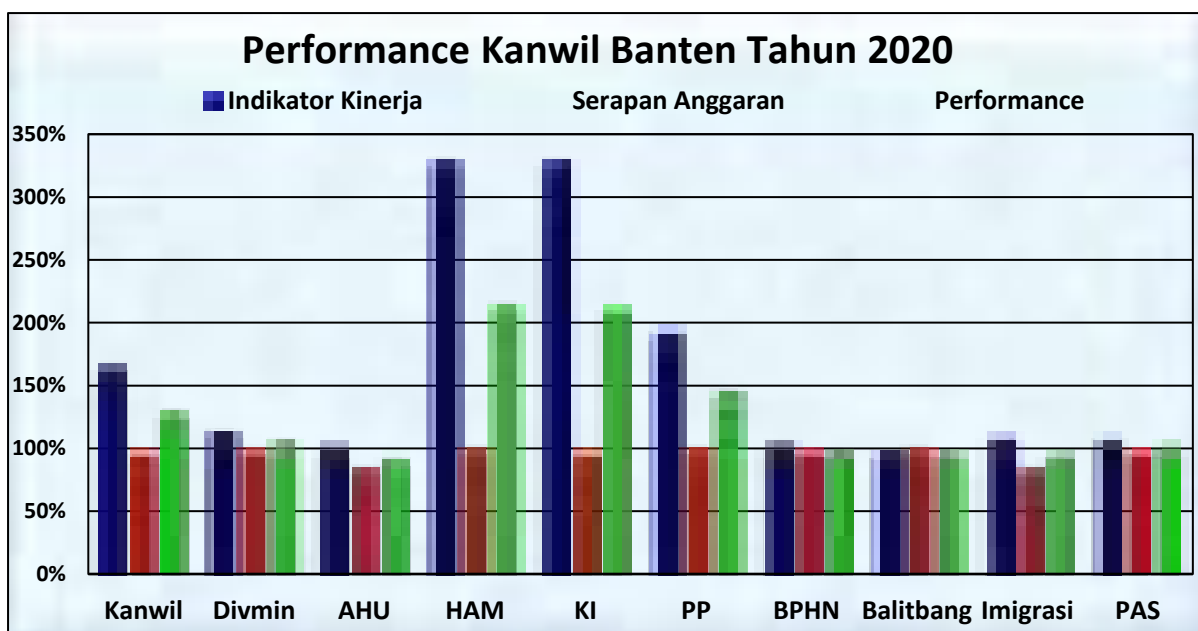
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

PROGRAM		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten		245103.256.000	235.634.032.862	96,14%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	17.400.401.000	17.111.276.627	98,34%
2	Program Administrasi Hukum Umum	2.568.000.000	2.171.589.953	84,56%
3	Program Pemajuan HAM	228.984.000	228.764.000	99,90%
4	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	780.915.000	753.290.000	96,46%
5	Program Pembentukan Hukum	167.378.000	167.378.000	100%
6	Program Pembinaan Hukum Nasional	1.972.278.000	1.931.312.000	97,92%
7	Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	61.890.000	61.790.000	99,84%
8	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	29.949.330.000	25.237.582.302	84,27%
9	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	191.974.080.000	187.971.049.980	97,91%

PERFORMANCE KANWIL BANTEN TAHUN 2020

DASHBOARD PERFORMANCE					
NO	UNIT KERJA/SATUAN KERJA	CAPAIAN KINERJA		PERFORMANCE	EFISIENSI SUMBER DAYA
		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN		
A	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	166,35%	96,14%	131,25%	70,22%
1	Divisi Administrasi	115,20%	98,34%	106,77%	16,86%

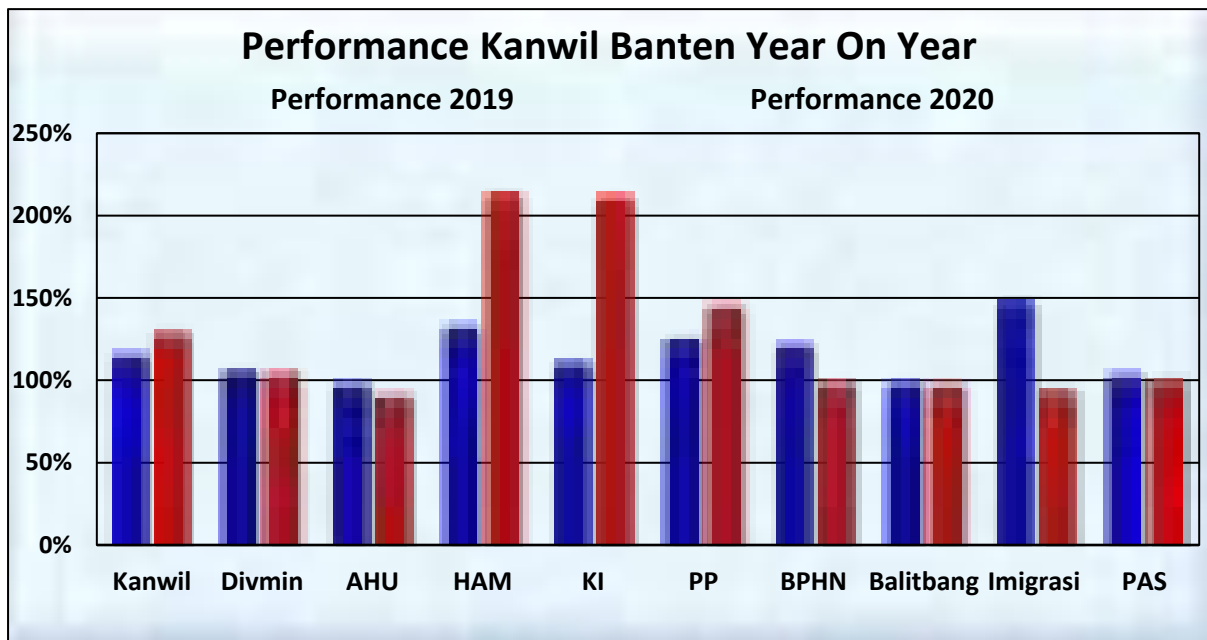
2	Divisi Yankum – Adminstrasi Hukum Umum	102,85%	84,56%	93,71%	18,29%
3	Divisi Yankum - Hak Asasi Manusia	328,33%	99,90%	214,12%	228,43%
4	Divisi Yankum - Kekayaan Intelektual	328,06%	96,46%	212,26%	231,59%
5	Divisi Yankum - Peraturan Perundang-undangan	193,33%	100,00%	146,67%	93,33%
6	Divisi Yankum - Badan Pembinaan Hukum Nasional	104,49%	97,92%	101,21%	6,57%
7	Divisi Yankum - Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	100,00%	99,84%	99,92%	0,16%
8	Divisi Keimigrasian	109,69%	84,27%	96,98%	25,42%
9	Divisi Pemasarakatan	108,49%	97,91%	103,20%	10,58%



PERFORMANCE KANWIL BANTEN YEAR ON YEAR (YoY)

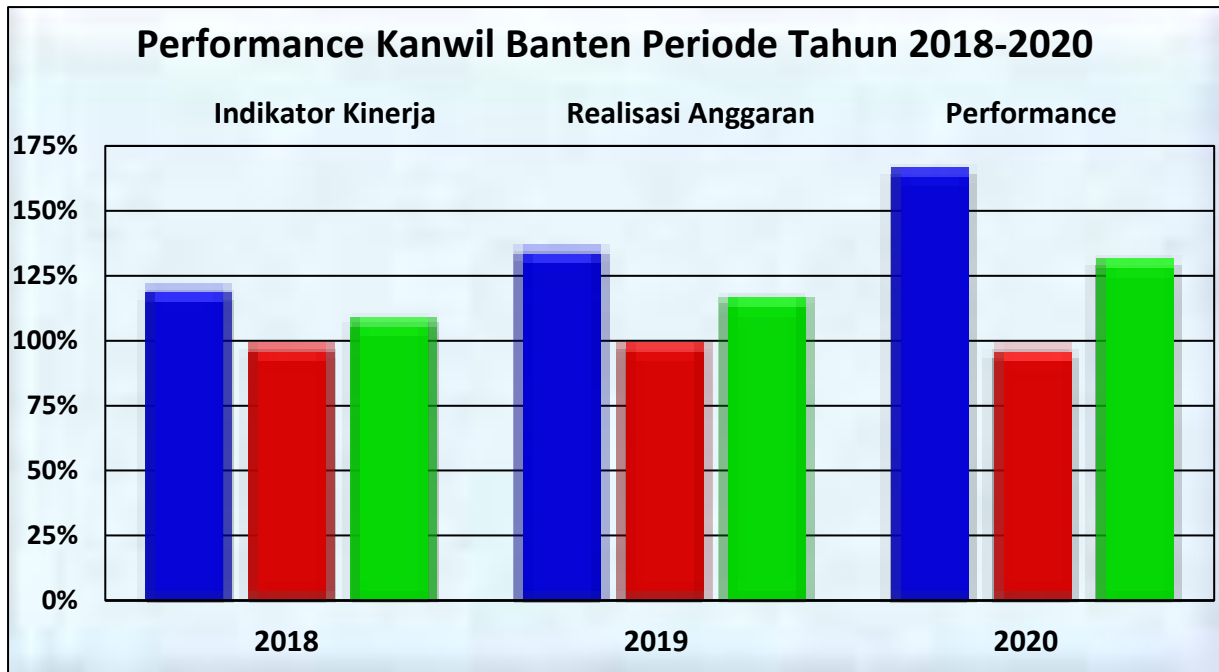
PERFORMANCE KANWIL BANTEN								
No	Unit Kerja/ Satuan Kerja	2019			2020			Performance GAP YoY (%)
		Indikator Kinerja	Serapan Anggaran	Performance	Indikator Kinerja	Serapan Anggaran	Performance	
A	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	133,51%	98,75%	116,13%	166,35%	96,14%	131,25%	15,12%
1	Divisi Administrasi	114,58%	98,77%	106,68%	115,20%	98,34%	106,77%	0,09%
2	Divisi Yankum – AHU	100,00%	98,09%	99,05%	102,85%	84,56%	93,71%	-5,34%

3	Divisi Yankum - HAM	166,67%	99,87%	133,27%	328,33%	99,90%	214,12%	80,85%
4	Divisi Yankum – KI	125,00%	98,03%	111,52%	328,06%	96,46%	212,26%	100,74%
5	Divisi Yankum – PP	152,50%	99,82%	126,16%	193,33%	100,00%	146,67%	20,51%
6	Divisi Yankum – BPHN	145,73%	98,67%	122,20%	104,49%	97,92%	101,21%	-20,99%
7	Divisi Yankum – Balitbang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,84%	99,92%	-0,08%
8	Divisi Keimigrasian	197,55%	99,79%	148,67%	109,69%	84,27%	96,98%	-51,69%
9	Divisi Pemasyarakatan	108,64%	99,95%	104,30%	108,49%	97,91%	103,20%	-1,1%



KINERJA KANWIL BANTEN PERIODE TAHUN 2018 - 2020

KINERJA KANTOR WILAYAH BANTEN				
NO	CAPAIAN BERDASARKAN	2018	2019	2020
1	Indikator Kinerja	119,58%	134,52%	166,35%
2	Realisasi Anggaran	97,75%	98,91%	96,14%
3	Performance	108,66%	116,71%	131,25%



Berdasarkan infografis yang telah ditampilkan diatas, dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten untuk periode tahun 2020 sangat baik dengan capaian indikator kinerja sebesar 166,35% dan capaian realisasi anggaran sebesar 96,14% sehingga dapat diketahui *performance* Kanwil Banten berdasarkan hasil rata-rata capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar 131,25%. Hasil capaian ini didukung atas capaian indikator kinerja yang secara signifikan jauh melebihi dari target yang telah ditentukan seperti capaian program pemajuan HAM, Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual, dan program pembentukan hukum. Keberhasilan capaian kinerja Kanwil Banten pada tahun 2020 ini di buktikan dengan prestasi yang telah diraih antara lain :

1. Penghargaan sebagai “Terbaik Pertama” Pelaksana Reformasi Birokrasi Tingkat Kantor Wilayah Tahun 2020 yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
2. Penghargaan dari Kemenpan-RB kepada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020.
3. Penghargaan dari Kemenpan-RB kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020.
4. Meraih Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2020 dari Menteri Hukum dan HAM kepada LP Kelas III Rangkasbitung.
5. Meraih Penghargaan atas upaya dalam mendorong sebagian besar atau seluruh Kabupaten/Kota di Wilayahnya menjadi Kabupaten/Kota Peduli HAM. Terdapat 8

Kabupaten/Kota atau seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Banten yang mendapat penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Capaian kinerja Kanwil Banten pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, terlihat dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2020 yang meningkat sebesar 45,05% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan dalam sisi kinerja anggaran, pada tahun 2020 realisasi anggaran Kanwil Banten terkoreksi sebesar -2,77% dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan berbagai faktor dan salah satunya sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang terjadi secara global dan merupakan Risiko Luar Biasa yang terjadi diluar kemampuan unit kerja dan berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian kinerja organisasi serta perlu segera ditangani. Akibat pandemi Covid-19 tersebut, terdapat beberapa kegiatan Kanwil Banten pada tahun 2020 ini yang harus tertunda dan menyesuaikan pelaksanaannya untuk menurunkan risiko penyebaran Covid-19 sehingga kinerja realisasi anggaran berjalan kurang baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kinerja pelaksanaan anggaran, maka Kanwil Banten melakukan *refocusing* anggaran melalui efisiensi dan penghematan anggaran sehingga dapat dialokasikan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Lingkungan Kanwil Banten.

Jika melihat besarnya dampak risiko yang ditimbulkan atas adanya pandemi Covid-19, capaian kinerja Kanwil Banten Tahun 2020 telah tercapai sangat optimal dengan hasil capaian melebihi target yang telah ditetapkan bahkan meningkat dibanding capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan hasil penanganan risiko yang cepat, dan tepat sasaran dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di lingkungan Kantor Wilayah Banten diantaranya sebagai berikut :

1. Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten telah menerapkan secara ketat Disiplin Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam pencegahan penyebaran Covid-19, Pengecekan suhu tubuh, Wajib memakai masker, social distancing, pengaturan jarak antrian dan tempat duduk layanan, dan lain sebagainya.
2. Pelaksanaan Refocusing Anggaran Penanganan Covid-19 dengan jumlah refocusing anggaran yang berasal dari seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Banten sebesar Rp. 3.749.857.000,-
3. Pelaksanaan Bakti Sosial Covid-19 bagi pegawai dan masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, antara lain :
 - a. Pembagian sembako bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 berjumlah 550 paket sembako dengan anggaran sebesar Rp. 106.250.000,- dan

- dilaksanakan dalam 2 kegiatan.
- b. Penyerahan bantuan sosial tahap I kepada 120 pegawai Kantor Wilayah Banten berupa masker, desinfektan spray, hand sanitizer, Vitamin CDR.
 - c. Penyerahan bantuan kepada pegawai dan WBP pada UPT Pemasarakatan di Wilayah Banten berupa masker sebanyak 770 pcs, sarung tangan 144 pcs, dan paket vitamin dengan total anggaran sebesar 143.410.000,-
 - d. Penyerahan bantuan berupa masker, handsanitizer, dan vitamin dalam rangka Hari Dharma Karyadhika kepada masyarakat di sekitar Kantor Wilayah Banten dengan total anggaran sebesar 9.182.000.
 - e. Penyerahan bantuan sosial tahap II kepada 120 pegawai Kantor Wilayah Banten berupa masker, hand sanitizer, multivitamin, & Vitamin D
4. Pelaksanaan Test Covid-19 pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang dilaksanakan selama periode 27 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan total 8.772 Test Covid-19 kepada Pegawai, WBP / Anak, dan pihak terkait sesuai kebutuhan Satuan Kerja masing-masing dengan total pelaksanaan Rapid Test sejumlah 8.251 dan Swab Test sejumlah 649 dengan rincian hasil pelaksanaan test sebagai berikut :
- a. Hasil pelaksanaan Rapid Test terdapat 8.229 Rapid Test dengan hasil non reaktif dan 22 Rapid Test dengan hasil reaktif. Kemudian menindaklanjuti dari 22 Rapid Test dengan hasil reaktif, Satuan Kerja telah melakukan upaya-upaya penanganan Covid-19 melalui pelaksanaan Test Swab untuk memastikan hasil test Covid-19, memerintahkan untuk isolasi mandiri pegawai dan WBP/ Anak, dan melakukan test Covid-19 kembali jika telah melaksanakan isolasi mandiri.
 - b. Sedangkan hasil pelaksanaan Swab Test terdapat 631 Swab Test dengan hasil negatif, 8 Swab Test dengan hasil positif. Menindaklanjuti 8 Swab Test dengan hasil positif telah dilakukan upaya-upaya penanganan Covid-19 diantaranya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, memerintahkan untuk isolasi mandiri 14 hari kepada pegawai yang positif Covid-19 berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat, melakukan pemantauan rutin kepada pegawai positif Covid-19, melakukan Swab Test kembali jika telah melewati masa isolasi mandiri 14 hari untuk memastikan bahwa pegawai telah sembuh dari Covid-19.
5. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten telah melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 serta untuk menjaga stabilitas dan keamanan di lingkungan Satuan Kerja seperti koordinasi secara internal (Kantor Wilayah, Unit Pusat), koordinasi dengan instansi kesehatan (Dinkes, RS, PMI,

Puskesmas, dll) serta koordinasi dengan Pihak Keamanan setempat (TNI ,POLRI).

6. Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 diantaranya :
 - a. Sosialisasi dan edukasi tentang dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 baik kepada pegawai maupun WBP/Anak.
 - b. Penyuluhan hukum tentang penerapan protokol kesehatan di Wilayah kepada masyarakat.
 - c. Penyebaran informasi, komunikasi dan edukasi mengenai Covid-19 kepada masyarakat dan pegawai yang dipublikasikan melalui media Videotron, Media Sosial Kantor Wilayah, penayangan video bertema “Adaptasi New Normal” di lobi Kantor Wilayah Banten, Pemasangan Spanduk/banner terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di sekitar lingkungan Satuan Kerja.

Untuk mengetahui rincian capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon 1 dengan masing-masing Program/DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, berikut hasil capaian dari indikator kinerja dan realisasi anggaran periode tahun 2020 beserta analisa atas capaian tersebut :

DIVISI ADMINISTRASI

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	7,1	9,243	130,18%
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	85	96,72	113,79%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	85	86,375	101,62%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Program/Output		Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	17.400.401.000	17.111.276.627	98,34%

PERFORMANCE TAHUN 2020

Dashboard Performance					
No	Satuan Kerja	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
1	Divisi Administrasi	115,20%	98,34%	106,77%	16,86%

REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

Indikator Kinerja	2019			2020			GAP YoY (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	7,1	9,38	132,11%	7,1	9,243	130,18%	-1,93%
2 Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	70	77,37	110,53%	85	96,72	113,79%	3,26%
3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	90	90,99	101,10%	85	86,375	101,62%	0,52%
			114,58%			115,20%	0,62

REALISASI ANGGARAN (YoY)

Program/Output	Tahun 2019	Tahun 2020	GAP YoY (%)
1 Divisi Administrasi – Dukungan Manajemen			
Pagu Anggaran	12.340.103.000	17.400.401.000	
Realisasi Anggaran	12.188.735.011	17.111.276.627	
Capaian	98,77%	98,34%	-0,43%

Performance Divisi Administrasi untuk periode Tahun 2020 mencapai 106,77%. Penilaian performance ditentukan berdasarkan rata-rata hasil capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran sesuai dengan yang ditampilkan pada tabel diatas. Sedangkan untuk efisiensi sumber daya di ukur berdasarkan refleksi dari hasil capaian indikator kinerja terhadap realisasi anggaran. Hasil pengukuran efisiensi sumber daya pada tahun 2020 diketahui sebesar 16,86%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sebesar 115,20% dihasilkan dari realisasi anggaran sebesar 98,34% (efisiensi sumber daya).

Hasil capaian indikator kinerja pada tahun 2020 telah tercapai sangat optimal dengan capaian melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan atau mencapai sebesar 115,20%. Analisa atas hasil capaian indikator kinerja pada tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Capaian sasaran strategis Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten diukur berdasarkan 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja : Indeks kepuasan layanan internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Pengukuran indikator kinerja tersebut berdasarkan hasil Survei Integritas kepada pegawai Kantor Wilayah Banten terkait layanan internal pada Kantor Wilayah Banten yang dilaksanakan secara mandiri berbasis elektronik melalui laman website resmi : <https://survei.balitbangham.go.id/> dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Hasil Penilaian Survei Integritas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Satuan Kerja	Responden	Pejabat/pegawai		Survei Integritas		
		Struktural	JFT/JFU	Skala (100)	Nilai Mutu	Konversi Skala 10
Kanwil Banten	114	31	83	92,43	A	9,243

Berdasarkan hasil survei tersebut, diketahui nilai Integritas terkait layanan internal pada Kanwil Banten sebesar 9,243 (skala 10). Hasil capaian tersebut telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan target indeks kepuasan layanan internal sebesar 7,1 atau telah mencapai 130,18% dari target yang telah ditetapkan.

- b. Indikator Kinerja : Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 masih dalam tahap pelaksanaan. Oleh karena itu, Realisasi atas indikator kinerja tersebut mengacu kepada hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 dengan nilai RB sebesar 22,73 (skala 23,50). Jika dikonversikan ke skala 100 sesuai dengan target dari indikator kinerja maka diketahui nilai RB sebesar 96,72 (skala 100). Sehingga hasil penilaian Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Banten telah melampaui target kinerja yang telah ditentukan pada tahun 2020 yaitu sebesar 85 dengan hasil capaian kinerja 113,79%. Keberhasilan capaian kinerja tersebut juga

tercermin pada prestasi yang telah diraih Kantor Wilayah pada tahun 2020 yaitu meraih Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai Terbaik Pertama Pelaksana Reformasi Birokrasi Tingkat Kantor Wilayah Tahun 2020

c. Indikator Kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terkait layanan dan akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Banten yang dilaksanakan secara mandiri berbasis elektronik melalui laman website resmi : <https://survei.balitbangham.go.id/> dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Hasil Penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Satuan Kerja	Responden	IKM			IPK			Survey IKM & IPK
		Skala 20	Nilai Mutu	Konversi Skala 100	Skala 15	Nilai Mutu	Konversi Skala 100	
Kanwil Banten	217	17,43	A	87,15	12,84	A	85,6	86,375

Berdasarkan hasil survei tersebut, nilai IKM & IPK terkait layanan publik dan akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Banten sebesar 86,375. Hasil capaian tersebut telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kanwil Banten sebesar 85 atau telah mencapai 101,62% dari target yang telah ditetapkan. Hasil capaian tersebut didukung oleh beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah Banten, diantaranya :

- Terwujudnya *Law Human Rights Centre* agar proses pelayanan lebih mudah, nyaman, dan Transparan sesuai dengan standar pelayanan publik pada Kantor Wilayah Banten.
- MOU Kerjasama dengan Kabupaten Pandeglang tentang Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diselenggarakan di Kabupaten Pandeglang
- Pelaksanaan percepatan pelayanan publik melalui inovasi-inovasi yang telah dilakukan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten seperti : layanan konsultasi KI Online, Sistem Informasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sikampas), Notifikasi Dokumen Keimigrasian, layanan notaris online, gerai paspor simpatik di mall (Tangcity Mall – Kota Tangerang), mobile unit pelayanan paspor, dan counter check-in mandiri layanan paspor.

- Pelaksanaan transparansi informasi kepada publik melalui media website, media sosial seperti facebook, instagram, twitter, dan publikasi melalui Youtube seperti program Sepekan Banten Prestasi, serta Brokum & Broham.

DIVISI YANKUM - ADMINISTRASI HUKUM UMUM

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU	3,0	3,0	100%
	Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%	84,56%	105,70%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Program/Output	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1 Administrasi Hukum Umum	2.568.000.000	2.171.589.953	84,56%

PERFORMANCE TAHUN 2020

Dashboard Performance					
No	Satuan Kerja	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
1	Divisi Yankum - AHU	102,85%	84,56%	93,71%	18,29%

REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

Indikator Kinerja	2019			2020			GAP YoY (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1 Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU	<i>Tidak ditargetkan</i>			3,0	3,0	100%	-
2 Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	<i>Tidak ditargetkan</i>			80%	84,56%	105,70%	-
3 Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat, dan	12	12	100%	<i>Tidak ditargetkan</i>			-

kewarganegaraan						
			100%		102,85%	2,85%

REALISASI ANGGARAN (YoY)

Program/Output		Tahun 2019	Tahun 2020	GAP YoY (%)
1	Divisi Yankum – Administrasi Hukum Umum			
	Pagu Anggaran	3.500.000.000	2.568.000.000	
	Realisasi Anggaran	3.433.260.566	2.171.589.953	
	Capaian	98,09%	84,56%	-13,53%

Performance Bidang Administrasi Hukum Umum untuk periode Tahun 2020 adalah sebesar 93,71%. Penilaian performance ditentukan berdasarkan pengukuran capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran dari Program Administrasi Hukum Umum sesuai dengan yang ditampilkan pada tabel diatas.

Dilihat dari tabel realisasi indikator kinerja, capaian indikator kinerja pada tahun 2020 telah mencapai 102,85%. Analisa hasil capaian indikator kinerja periode tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif

Berikut kegiatan yang telah diselenggarakan dalam rangka penyebaran informasi dan pelayanan AHU di Wilayah Provinsi Banten periode tahun 2020 :

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta	Jumlah Peserta
1	FGD “Peningkatan Jumlah Pendaftaran/ Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di Kabupaten/ Kota” Wilayah Barat	22-09-2020	Hotel Swiss Bell Modern Cikande	Pemerintah Kota Serang, Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Pandeglang & Kab. Lebak	50 Orang
2	FGD “Peningkatan Jumlah Pendaftaran/ Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di Kabupaten/ Kota” Wilayah Timur	25-09-2020	Menara Top Food	Pemerintah Kota Tangerang, Kab. Tangerang, & Kota Tangerang Selatan	50 Orang
3	Diseminasi “Implementasi	02-09-2020	Hotel Yasmin Karawaci	Pengurus Daerah Kab. Tangerang Ikatan	60 Orang

	Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Ownership) di Wilayah Provinsi Banten”			Notaris Indonesia, Notaris Kab. Tangerang, Perwakilan dari korporasi (perusahaan)	
4	Rapat Koordinasi “Peningkatan Pengawasan MPW dan MPD terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah”	26-08-2020	Hotel Aryaduta Lippo Village	Anggota MPW Banten, Anggota MPD seluruh Kab/Kota, Pengurus Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia seluruh Kab/Kota	60 Orang
5	Diseminasi Layanan AHU melalui Radio	17 s.d 24-06-2020	Radio X Channel, Radio TOP FM Cilegon, Radio Star FM Tangerang, & Radio Paranti Pandeglang	Masyarakat di Wilayah Provinsi Banten	-

a. Indikator Kinerja : Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU

Pengukuran kinerja untuk target indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU ditentukan melalui hasil pelaksanaan *post test* pada akhir kegiatan diseminasi/sosialisasi. Pertanyaan yang disajikan dalam *post test* terkait dengan Layanan AHU secara umum. Hasil skor *post test* rata2 peserta kegiatan kemudian diukur berdasarkan skala 0 – 3 untuk menentukan tingkat pemahaman pada layanan AHU. Berikut pengukuran indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah Banten:

Skala	Skor Post Test	Tingkat Pemahaman AHU
0	0 – 25	Tidak Memahami
1	26 – 50	Kurang Memahami
2	51 – 75	Cukup Memahami
3	76 – 100	Sangat Memahami

Terdapat 4 kegiatan diseminasi/sosialisasi yang telah dilakukan *post test* untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah Banten, berikut rincian hasil pelaksanaan *post test* :

No	Kegiatan	Tanggal	Peserta Post Test	Skor rata-rata	Skala Indeks	Tingkat Pemahaman
1	FGD “Peningkatan Jumlah Pendaftaran/ Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum	22-09-2020	50 Orang	88,4	3	Sangat Memahami

	di Kabupaten/ Kota” Wilayah Barat					
2	FGD “Peningkatan Jumlah Pendaftaran/ Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di Kabupaten/ Kota” Wilayah Timur	25-09-2020	50 Orang	91,5	3	Sangat Memahami
3	Diseminasi “Implementasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Ownership) di Wilayah Provinsi Banten”	02-09-2020	60 Orang	84,7	3	Sangat Memahami
4	Rapat Koordinasi “Peningkatan Pengawasan MPW dan MPD terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah”	26-08-2020	60 Orang	93,3	3	Sangat Memahami
Rata - rata				89,475	3	Sangat Memahami

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 4 kegiatan dengan total 220 peserta yang mengikuti post test, nilai rata-rata skor post test adalah sebesar 89,475 dengan nilai indeks 3,0 artinya masyarakat di Wilayah Banten sangat memahami terhadap Layanan AHU. Dari hasil pengukuran tersebut maka capaian indikator kinerja tentang Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU telah tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

- b. Indikator Kinerja : Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Penilaian indikator kinerja untuk persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan diukur berdasarkan hasil realisasi anggaran Program Administrasi Hukum Umum dengan rincian sebagai berikut :

Program/Output		Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Administrasi Hukum Umum	2.568.000.000	2.171.589.953	84,56%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran program Administrasi Hukum Umum mencapai 84,56%. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 80% maka realisasi indikator kinerja tentang persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan telah tercapai 105,70%.

DIVISI YANKUM - HAK ASASI MANUSIA

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	5 Instansi Pemerintah	9 Pemda	180%
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	8 Kab/Kota	800%
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM di Kantor Wilayah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah (18 UPT Kanwil Banten)	100%
Jumlah Layanan HAM Di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	3 Rekomendasi	7 Rekomendasi	233,33%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Program/Output		Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pemajuan HAM	228.984.000	228.764.000	99,90%

PERFORMANCE TAHUN 2020

Dashboard Performance					
No	Satuan Kerja	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
1	Divisi Yankum - HAM	328,33%	99,90%	214,12%	228,43%

REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

INDIKATOR KINERJA	2019			2020			GAP YoY (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1 Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	4	8	200%	5	9	180%	-20%
2 Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	3	6	200%	1	8	800%	600%
3 Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil	<i>Tidak ditargetkan</i>			1	1	100%	-

	Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM di Kantor Wilayah							
4	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	Tidak ditargetkan			3	7	233,33%	-
5	Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1	1	100%	Tidak ditargetkan			-
				166,67%			328,33%	161,66%

REALISASI ANGGARAN (YoY)

Program/Output		Tahun 2019	Tahun 2020	GAP YoY (%)
1	Divisi Yankum – Hak Asasi Manusia			
	Pagu Anggaran	228.984.000	228.984.000	
	Realisasi Anggaran	228.684.000	228.764.000	
	Capaian	99,87%	99,90%	0,03%

Berdasarkan tabel yang ditampilkan, *performance* Divisi Yankum - Hak Asasi Manusia untuk periode Tahun 2020 sangat baik dengan capaian sebesar 214,12%. Capaian tersebut besar dipengaruhi oleh hasil capaian indikator kinerja yang jauh melebihi dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja yaitu dengan capain indikator kinerja sebesar 328,33%. Analisa realisasi indikator kinerja Divisi Yankum - Hak Asasi Manusia pada periode tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM

Capaian sasaran terkait Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM diukur berdasarkan 3 indikator kinerja dengan realisasi pada periode tahun 2020 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian	Keterangan
1	Program Aksi HAM	9 Instansi Pemerintah	8 Pemerintah Daerah Kab/Kota, dan 1 Pemerintah Provinsi Banten
2	Kab/Kota Peduli HAM	8 Kab/Kota	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Banten
3	Pelayanan Publik berbasis HAM di Kantor Wilayah	1 Instansi Pemerintah (Kanwil Kemenkumham Banten)	18 UPT pada di Lingkungan Kantor Wilayah Banten

- a. Indikator Kinerja : Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM.

Seperti diuraikan pada tabel diatas, terdapat 9 instansi pemerintah di Wilayah Provinsi Banten yang telah melaksanakan program Aksi HAM yaitu 8 Pemerintah Kab/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi yaitu Pemerintah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 5 instansi pemerintah, maka capaian indikator kinerja terkait Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM telah tercapai 180%

- b. Indikator Kinerja : Jumlah Kab/Kota Peduli HAM.

Pada tahun 2020 ini seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Banten ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan jumlah 8 Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM. Atas telah keberhasilan tersebut, Kantor Wilayah Banten juga meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM atas upaya dalam mendorong sebagian besar atau seluruh Kabupaten/Kota di Wilayahnya menjadi Kabupaten/Kota Peduli HAM. Berdasarkan target yang ditetapkan yaitu 1 Kab/Kota Pedulia HAM, maka capaian atas realisasi indikator kinerja tersebut telah tercapai 800% dari target yang telah ditetapkan.

- c. Indikator Kinerja : Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM di Kantor Wilayah

Berdasarkan uraian tabel sebelumnya terdapat 18 UPT di Lingkungan Kanwil Banten yang telah menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM yaitu 9 Lembaga Pemasyarakatan, 3 Rumah Tahanan Negara, 3 Balai Pemasyarakatan, dan 3 Kantor Imigrasi. Atas hasil tersebut maka capaian indikator kinerja telah tercapai 100%.

2. Sasaran Strategis : Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

- a. Indikator Kinerja : Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah.

Capaian sasaran strategis dari Jumlah Layanan HAM Di Wilayah diukur berdasarkan 1 indikator kinerja dengan target 3 rekomendasi. Realisasi indikator kinerja tersebut sampai dengan periode tahun 2020 telah terdapat 7 rekomendasi layanan HAM yang telah diselesaikan di Wilayah Banten dengan total 7 permohonan pelayanan

komunikasi masyarakat (Yankomas) selama tahun 2020. Diukur berdasarkan target indikator kinerja maka capaian indikator kinerja telah tercapai 233,33% dari target. Rincian realisasi pelayanan komunikasi masyarakat pada tahun 2020 di Wilayah Banten sebagai berikut :

No	Tanggal Pengaduan	Wilayah	Layanan HAM
1	23 Januari 2020	Kabupaten Pandeglang	Rekomendasi perihal Permohonan untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester
2	11 Juni 2020	Kota Serang	Rekomendasi perihal Permintaan Akta Kelahiran pada mantan suami untuk keperluan administrasi masuk sekolah anak
3	13 Juli 2020	Kabupaten Pandeglang	Rekomendasi perihal Perselisihan warisan
4	20 Juli 2020	Kota Serang	Rekomendasi perihal Permohonan mendapatkan naungan tempat tinggal
5	24 Agustus 2020	Kota Cilegon	Rekomendasi perihal Perselisihan rumah tangga
6	17 September 2020	Kota Serang	Rekomendasi perihal Perselisihan rumah tangga
7	25 September 2020	Kota Cilegon	Rekomendasi perihal Pemutusan hubungan kerja

DIVISI YANKUM - KEKAYAAN INTELEKTUAL

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Banten yang berkualitas baik sekali	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	120 jumlah permohonan	745 permohonan	620,83%
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 stakeholder	60 stakeholder	200%
	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	3 Lokus	150%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Program/Output		Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	780.915.000	753.290.000	96,46%

PERFORMANCE TAHUN 2020

Dashboard Performance					
No	Satuan Kerja	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
1	Divisi Yankum - Kekayaan Intelektual	328,06%	96,46%	212,26%	231,59%

REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

Indikator Kinerja	2019			2020			GAP YoY (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1 2020 : Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah, 2019 : Presentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Banten	80%	100% (169 permohonan KI)	125%	120	745	620,83%	495,83%
2 2020 : Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah 2019 : Presentase Penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Banten	80%	100% (5 kegiatan)	125%	30	60 (11 kegiatan)	200%	75%
3 2020 : Jumlah Pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah 2019 : Presentase penyelenggaraan penegakan hukum di daerah	80%	100% (3 kegiatan)	125%	2	3	150%	25%
4 Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah	80%	100% (9 KIK terdaftar)	125%	Tidak ditargetkan			-
			125%			328,06%	203,06%

REALISASI ANGGARAN (YoY)

Program/Output		Tahun 2019	Tahun 2020	GAP YoY (%)
1	Divisi Yankum – Kekayaan Intelektual			
	Pagu Anggaran	198.057.000	780.915.000	
	Realisasi Anggaran	194.157.000	753.290.000	
	Capaian	98,03%	96,46%	-1,57%

Performance Bidang Kekayaan Intelektual periode tahun 2020 mencapai 212,26%. *Performance* tersebut diukur berdasarkan capaian indikator kinerja dan capaian realisasi anggaran seperti yang telah diuraikan pada tabel diatas. Capaian indikator kinerja bidang Kekayaan Intelektual mengacu kepada sasaran strategis terkait terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Banten yang berkualitas baik sekali.

Berdasarkan tabel realisasi indikator kinerja *year on year*, terlihat capaian indikator kinerja tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 203,06% (YoY) dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan seluruh indikator kinerja tercapai jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan seperti yang terlihat pada tabel Realisasi Indikator Kinerja. Untuk analisis capaian sasaran strategis bidang Kekayaan Intelektual periode tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut :

No	Permohonan Kekayaan Intelektual Di Wilayah Banten	
	Jenis	Jumlah
1	Permohonan Paten	0
2	Permohonan Hak Cipta	27
3	Permohonan Merek	717
4	Permohonan Perpanjangan Merek	0
5	Permohonan Indikasi Geografis	0
6	Permohonan Desain Industri	1
7	Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	0
	TOTAL	745

No	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Di Wilayah			
	Jenis Kegiatan	Tanggal	Tempat	Wilayah
A	Promosi dan Diseminasi			
1	Promosi & Diseminasi Kekayaan Intelektual	10-03-2020	Gedung Usaha Daerah	Kab. Tangerang
2	Sosialisasi Kekayaan Intelektual	10-07-2020	Kanwil Kemenkumham Banten	Kota Serang
3	Sosialisasi Kekayaan Intelektual	21-07-2020	SMKN 2 Kota Serang	Kota Serang
4	Promosi dan Diseminasi	28-07-2020	Universitas Faletehan	Kab. Serang